

**LAPORAN**  
**TENTANG**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**1. PENDAHULUAN**

**a. Umum**

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sejalan dengan hakikat RB, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan sebagaimana direncanakan dalam Rencana Aksi Pokja RB.

Untuk mengetahui capaian pelaksanaan RB dan permasalahan yang dihadapinya, pada tahun 2017 Kementerian Kominfo melaksanakan evaluasi. Evaluasi eksternal melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Biro Kepegawaian dan Organisasi mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB pada *exit meeting* Evaluasi RB tanggal 27 November 2017 yang menghasilkan rekomendasi di 8 (delapan) area perubahan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan dan mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pelaksana.

### **c. Dasar**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025;
- 3) Permenpan Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- 4) Permenpan & RB Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Kerja;
- 5) Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dilingkungan Kementerian Kominfo;
- 6) Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7) Surat Tugas Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor : 382/SJ.2/OT.02.01/12/2017 tanggal 8 Desember 2017;

## **2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 15 Desember 2017

Waktu : 09.00 s.d. selesai

Tempat : Gedung BPRTIK

Jl. Kerta Mukti Nomor 10 Ciputat – Tangerang Selatan

## b. Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 dibuka oleh Kepala Sekretariat Jenderal dengan narasumber :

- 1) Ibu Tini Sumartini (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI);
- 2) Ibu Jujun Rusmijati (Kementerian Keuangan RI);

Dengan dihadiri peserta dari perwakilan dari setiap Pokja RB Kementerian Kominfo.

Bapak Ivan Santoso menyampaikan :

- a. Segala puji bagi Allah, kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul hari ini dalam rapat Monitoring dan Evaluasi dengan tema Evaluasi Efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mendorong Perubahan di Kementerian Kominfo.
- b. Pada tanggal 27 November 2017 telah dilakukan *exit meeting* Evaluasi RB yang menghasilkan rekomendasi di 8 (delapan) area perubahan. Tujuan rapat hari ini dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
- c. Setiap Pokja Perubahan berdasarkan Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Roadmap RB tahun 2015-2019 dan rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB hari ini akan menyusun dan mendiskusikan bersama rencana aksi RB tahun 2018 beserta susunan anggarannya. Apakah pokja Reformasi Birokrasi bisa bekerja efektif efisien.
- d. Sebelumnya kita akan menyimak bersama *sharing* dari narasumber (Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) tentang sejarah dan strategi dalam Reformasi Kelembagaan serta sistem dan nilai-nilai di Kementeriannya. Kementerian Keuangan dipilih karena keberadaan mereka dalam mengelola perubahan tersebut dapat dirasakan oleh KL lain dan masyarakat. Demikian juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan kami ingin tahu bagaimana birokrasi merespon komitmen perubahan yang dilakukan oleh Menteriannya dalam program-program yang nyata. Kami harap paparan dari narasumber dapat memberikan pencerahan dan berdampak baik kepada Kementerian Kominfo, dengan menginspirasi dalam bentuk strategi perubahan

yang substansial yang efektif dan efisien serta dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Ibu Farida Dwi Cahyarini menyampaikan :

- a. Pada tanggal 16 Desember 2017 Kementerian Kominfo mengadakan kegiatan Literasi Digital bagi Wanita menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu komunitas Kebaya, Kopi, dan buku serta Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang membina UMKM.
- b. Diskusi hari ini buat per Pokja agar dapat memantau keseriusan dari Pokja untuk programnya. Karena dari *exit meeting* dengan Kementerian PAN dan RB banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
- c. Jika melihat capaian nilai RB lima tahun kebelakang secara dokumen lengkap namun perubahan belum bisa dirasakan secara keseharian.
- d. Pokja MP harus lebih memaksimalkan peran *agent of change* sebagai penggerak perubahan di lingkungannya dan lebih meningkatkan peran serta seluruh unit kerja terhadap pelaksanaan RB. Bisa terwujud jika kita secara berkala dan rutin mengadakan pertemuan, untuk melihat perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Program kerja harus sejalan dengan Roadmap RB.
- e. Pokja Peraturan Perundang-undangan mendapat nilai lebih dari Kemenkumham untuk simplifikasi perundang-undangan dengan mendapatkan penghargaan untuk JDIH nya (ranking 4) karena mudah diakses oleh masyarakat.
- f. Untuk Pokja Organisasi, proses reorganisasi agar awal tahun selesai.
- g. Pokja Penataan Tatalaksana, terus melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap Peta Proses Bisnis (contohnya : evaluasi SOP). Agar terus berupaya meningkatkan e-Government dalam seluruh aspek kinerja di Kementerian Kominfo.
- h. Oktober yang lalu sudah *louncing* e-Audit. Selanjutnya untuk e-Budgeting dan e-Planning.

- i. Untuk Pokja Pentaan Sistem Manajemen SDM agar terus meningkatkan assessment hingga pada seluruh pegawai. Untuk *talentpool*, Eselon I s/d III sudah seluruhnya, untuk Eselon IV baru separuhnya (50%), untuk non Eselon diharapkan segera dilakukan. Selanjutnya untuk terus membangun pola karir sesuai dengan merit sistem. Untuk pemberian tunjangan kinerja yang belum berdasarkan capaian kinerja individu masih berdasarkan kehadiran diharapkan segera untuk membangun e-SKP.
- j. Pokja Penguatan Pengawasan, untuk melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas, benturan kepentingan, WBS, dan pengaduan masyarakat. Melakukan peningkatan pemahaman unit yang menangani WBK dan WBBM mengenai pembangunan ZI. Mendorong tingkat kematangan SPIP. Terus meningkatkan kapabilitas APIP terutama dalam hal berfokus terhadap klien audit berbasis resiko dan peningkatan . akuntabilitas kinerja.
- k. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melakukan penyempurnaan cascading kinerja hingga ke tataran pelaksana.
- l. Pokja Pelayanan Pelayanan Publik, mendorong terlaksanannya sistem *punishment* dan *reward* untuk pelaksana layanan serta pemberian kompensasi bagi penerima layanan jika layanan tidak sesuai dengan standar. Mendorong terciptanya sasaran layanan terpadu atau terintegrasi untuk seluruh layanan yang ada. Kementerian Kominfo sudah membuat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) namun dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 91 tahun 2017 yang menginstruksikan ijin berusaha merupakan *One Single Submission*. Saat ini sedang mengembangkan *One Single Submission*, Kementerian Kominfo mendapat tugas menyediakan infrastruktur hingga ke kabupaten kota dan menyediakan laman (1 Januari 2018 sudah uji coba dan di 1 Maret 2018 sudah launching). Rekomendasi selanjutnya adalah membuka publikasi hasil survey kepuasan masyarakat.
- m. Itulah rekomendasi Kementerian PAN dana RB. Tentunya akan memperbaiki diri sesuai rekomendasi, dan kalo bisa melebihinya. Harus melihat juga Rodmap RB ke depannya.

Materi yang disampaikan oleh Ibu Tini Sumartini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Di KKP ada satu unit yang memantau perkembangan hari perhari dari masing-masing Pokja dan dilakukan monev/rapat 3 bulan sekali.
- b. Setiap 2 tahun sekali dilakukan retreat dari Eselon I hingga staff, berkumpul bersama Menteri Susi. Dilakukan presentasi oleh Eselon I, selanjutnya tanya jawab dari eselon 1 hingga staf. Jika Eselon tidak bisa menjawab maka akan dicopot jabatannya. Keputusan-keputusan yang dihasilkan di retreat dilaksanakan.
- c. Jargon dari KKP adalah 24 jam per hari dan 7 hari perminggu, itu merupakan jam kerja di KKP.
- d. Komit dari pimpinan dan staf serta partisipasi aktif dari pimpinan dan staf di KKP.
- e. Dalam Penataan Perundang-undangan, banyak peraturan di KKP yang tidak harmonis dan tidak simple dan saling tumpang tindih. Mulai mengidentifikasi serta memetakan peraturan yang bisa digabungkan, seperti halnya simplifikasi dan harmonisasi. Dalam Peraturan Pemerintah ada beberapa peraturan yang terkait dengan K/L lain, memang betul diliat mana yang paling penting. Simplifikasi dan harmonisasi Peraturan Pemerintah pada tahun 2015 : 63 peraturan, tahun 2016 : 75 peraturan, pada tahun 2017 : 65 peraturan. Simplifikasi dan harmonisasi Keputusan Menteri pada tahun 2015 : 130 peraturan, tahun 2016 : 88 peraturan, dan tahun 2017 : 45 peraturan. Dilakukan identifikasi dan penyederhaan perizinan. Dalam rangka simplifikasi regulasi, KKP mendapat penghargaan *The Best Practice* dari Bappenas untuk pelaporan B09.
- f. Penataan Penguatan organisasi, organisasi sangat besar dan belum tepat ukuran serta tusi saling tumpang tindih. Dilakukan pengurangan 2 Eselon 1, 9 Eselon II, 46 Eselon III, dan 103 Eselon IV serta ada 2 badan yang digabungkan menjadi satu. Klasifikasi kelas jabatan untuk penyuluh, telah menyusun yang sudah disetujui oleh kemenpan.

- g. Penataan Tatalaksana, belum adanya Proses Bisnis dan e-Government belum seluruhnya terintegrasi. Melakukan moratorium sistem informasi dan persetujuan anggaran sistem informasi. Adanya *one Data* yang dikonsentrasikan di Pusdatin (hal ini akan mempercepat dan mempermudah dalam penyebaran informasi data akurat).
- h. Penataan Manajemen SDM, kinerja pegawai masih rendah, tingkat disiplin rendah, kompetensi pegawai tidak sesuai. Diadakan seleksi pengadaan CPNS di KKP menggunakan prinsip transparan, obyektif, bebas KKN, tanpa diskriminatif, dan tanpa dipungut biaya. Salah satu persyaratan harus lulus dengan nilai cumlud/nilai terbaik. Kurang lebih 10.486 pegawai KKP, sudah dilakukan esesment 90.079 sisanya akan dilakukan pada tahun 2018. Dilakukan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi/administrasi sehingga Di KKP yg bisa menduduki jabatan tinggi tidak hanya dari PNS.
- i. Penguatan Akuntabilitas, dilakukan penajaman arsitektur program sampai dengan komponen menuju efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran di KKP. Pada tahun 2015 bisa melakukan efisiensi 1T, di tahun 2016 sekitar 1,5T. Termasuk Inpres No. 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pematangan belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2016. Untuk PDLN Menteri KKP langsung *to the point*. Bantuan dilakukan langsung ke orang/kelompok yang membutuhkan tidak ke dinas nya.
- j. Penguatan pengawasan, saat ini ada 264 anggota tunas integritas KKP di *handle* oleh Itjen, pembentukan Komite Integritas (tugas Itjen mengingatkan). Di tahun 2017 ada target 7 unit kerja ada tambahan tunas integritas. WBK/WBBM tahun 2014 - 2016 : Pembangunan ada 25 Unit Kerja dan berpredikat WBK ada 4 Unit Kerja.
- k. Benturan kepentingan, adanya Peraturan Menteri KKP No.13 tahun. 2016 dipantau oleh Itjen. Gratifikasi, selalu dilakukan sosialisasikan dan diinformasikan terus menerus. Itjen sangat aktif melakukan pengawasan (mana saja yang perlu diperbaiki dan mana calon untuk masuk ke WBBM dan WBBK). Menteri KKP dapat dengan mudah mendapatkan berita-berita adanya

- gratifikasi dan langsung ditindaklanjuti. Melakukan rakor 1x seminggu, mana aja SOP yang harus di *update*.
- l. Manajemen Perubahan, Program Susiniasi dengan prioritas anggaran sebesar 80% untuk *stakeholder*, mudah dipahami (larangan menggunakan kata bersayap tidak jelas dan rancu), efisiensi (cek ulang harga satuan, menyusun SOP Implementasi Program, dan efisiensi program-program pendukung), dan keterbukaan (publikasi anggaran di *website*).
  - m. Peningkatan kualitas pelayanan publik, K/L meminta untuk mengidentifikasi pelayanannya. Adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Materi yang disampaikan oleh Ibu Jujun Rusmijati dari Kementerian Keuangan RI sebagai narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Dari tahun 2002 – 2012 dilakukan Reformasi Birokrasi, mulai melakukan *reform* Kementerian Keuangan. Selanjutnya di tahun 2013 dilakukan transformatik kelembagaan, dan perbaikan yang terus menerus dan signifikan.
- b. Reformasi Birokrasi telah dilakukan jauh sebelum Ibu Sri Mulyani masuk ke Kementerian Keuangan yaitu pada tahun 2002, sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara dirasakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki menjadi lebih lebih efektif dan efisien dan mekanisme kerja yang lebih bisa dipertanggungjawabkan.
- c. Tahun 2002 - 2008, diinisiasi dengan adanya 3 (tiga) undang-undang keuangan negara (pada tahun 2002) yang signifikan melakukan perubahan manajemen keuangan Negara. Kesadaran akan keberadaan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara inilah yang menstimulus untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Perubahan-perubahan yang telah ada di Kementerian Keuangan masih seporadis di beberapa Eselon I, pada tahun 2007-2008 Ibu Sri Mulyani menggabungkannya menjadi Reformasi Birokrasi di semua Eselon I, beliau mengawal betul perubahan ini.
- d. RB tahun 2002-2006 adalah Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Tahap I. RB tahun 2006-2012 adalah Reformasi Birokrasi secara masif (3 pilar RB).

- e. Pada tahun 2013-2025 adalah Transformasi Kelembagaan dengan di buat *blue print* reformasi kelembagaan. Perubahan penataan organisasi secara signifikan perlu menggandeng konsultan bertaraf internasional untuk menjamin kualitas *blueprint* dan strategi implementasinya (menggandeng konsultan sampai tahun 2025).
- f. Punya unit khusus di bawah Sekjen yaitu CTO (*Chief Transformation Officer*) untuk mengawal perubahan, pegawai pilihan yang bersedia melepas jabatannya (minimal Eselon III).

Tanya Jawab dengan narasumber :

Bapak Usuludin (Pokja SDM) menanyakan sebagai berikut :

Pak Jokowi mengatakan 43ribu peraturan perundang-undangan harus dihapuskan, hal ini perlu menjadi tugas bersama. Sejauh mana identifikasi simplifikasi hukum?

Sistem lelang jabatan apakah bisa mejadi peluang untuk SDM atau kelemahan?

Yang bisa menjadi contoh adalah Kementerian Keuangan dan KKP. Kenapa KKP bisa disclaimer?

Sistem retret bagus, perlu di contoh oleh Kominfo. Kemudian ada sistem mundur (jika Eselon I tidak bisa jawab pada saat retret mundur), harus konsisten.

Jawaban dari:

Kementerian Kelautan dan Perikanan :

- Terkait dengan *disclaimer*, karena memasukan permasalahan/dokumen yang telah sangat lama, namun permasalahan itu sudah terselesaikan.
- Sistem lelang jabatan untuk menjaring orang-orang yang lebih professional di luar KKP.
- Retret menjadi ajang *sharing knowledge* juga.
- Menunjuk unit yang menjadi penanggung jawab dalam setiap Pokja RB dan ditetapkan dengan SK Menteri.
- Setiap 3 (tiga) bulan melakukan rapat monev RB.
- Pada saat penilaian RB semua Eselon I hadir dan didampingi Eselon II.

- Membuat hubungan yang baik dengan Kementerian PAN dan RB agar cepat mendapatkan informasi perubahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
- Dibantu oleh BPHN untuk indentifikasi perundang-undangan.

Kementerian Keuangan :

- Menyatukan persepsi dan keakraban antara generasi muda dan generasi tua/sebelumnya.
- Memanfaatkan generasi muda di Kementerian Keuangan untuk menjadi agen perubahan. Mereka diberikan tugas untuk menyampaikan berbagai inisiatif, selain itu juga mereka diberikan edukasi dan *reward*. *Reward* bukan berupa finansial namun diberikan kesempatan untuk tampil di depan pimpinan dan berdialog dengan menteri.

Ibu Lita Navilati (Pokja Pelayanan Publik) menanyakan sebagai berikut :

Bagaimanan implementasi *reward* dan *punishment* untuk layanan publik di Kementerian Keuangan dan KKP?

Jawaban dari :

Kementerian Keuangan :

- *Reward* bukan berupa finansial. Karena bentuk layanan yang ada di Kementerian Keuangan berbeda-beda maka penghargaan diberikan untuk unitnya/di Eselon I. Setelah reform pertama setiap unit layanan membuat janji layanan. Untuk pegawai *reward* berupa training terkait dengan pekerjaannya seperti training *executive* ke luar negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan :

- Tunkin sudah berdasarkan kinerja dari pegawai, tidak hanya absensi saja. KKP membuat aturan untuk tunkin itu tanggung renteng, jika staf melakukan kesalahan atasannya juga akan kena. Di KKP sendiri kurang ada *reward* karena menjadi PNS ya harus kerja, lebih banyak *punishmentnya*.

- Untuk sekolah dibuka luas bagi seluruh pegawai KKP. Selalu dicarikan link untuk sekolah ke dalam maupun luar negeri, tapi harus terukur juga dalam arti harus sesuai dengan tusinya.
- Untuk pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dilihat dari jabatannya.

Bapak Randy Arninto (Pokja Pengawasan) menanyakan sebagai berikut :

Apakah tim khusus yang dibuat tersebut tidak dibebani dengan tusi utama? Apakah tim ini memang khusus mengerjakan program kerja di pokja? Untuk penganggaran Pokja RB sistemnya seperti apa karena diluar struktur (jika di Pokja Pengawasan seadanya karena yang utama untuk anggaran yang tusi nya)? Apakah di Kementerian Keuangan dan di KKP pada saat penilaian PMPRB ditanyakan mengenai untuk level maturitinya harus 3 (tiga)? Banyak rencana aksi yang telah dilakukan serta penerapan SPIP di Kementerian Kominfo namun ketika level maturiti belum mencapai 3 (tiga) sepertinya yang lain tidak dinilai.

Jawaban dari :

Kementerian Keuangan :

- Yang memonitoring reform yaitu CTO (*Chief Transformation Officer*) hanya bekerja untuk itu merupakan pegawai pilihan yang bersedia melepas jabatannya (minimal Eselon III). Sedang kan untuk Pokja RB bekerjanya disambi/berbarengan dengan tusinya. Untuk tim *dedicated* mendapatkan honor tim. Untuk yang tim monitor harus mempunyai ukuran yang jelas.
- Untuk PMPRB murni menggunakan pedoman dari Kementerian PAN dan RB. Nilai maturity Kementerian Keuangan sudah 3 (tiga).

Kementerian Kelautan dan Perikanan :

- Diawal Renja di Biro Hukum untuk anggaran sudah membuat program 1 (satu) tahun. Di KKP ada anggaran untuk RB.
- Pokja RB bekerjanya disambi/berbarengan dengan tusinya.

Ibu Cahaya Khoironi (Pokja SDM) menanyakan sebagai berikut :

Apakah yang menjadi dasar/basis dalam penataan organisasi? Kami selalu berbenturan dengan kebutuhan organisasi. Apakah yang dilakukan/strategi setelah melakukan pengurangan 109 Eselon III?

Jawaban dari :

Kementerian Kelautan dan Perikanan :

- Organisasi harus top down, memanggil pakar-pakar organisasi untuk memaparkan pemahaman organisasi. Pengurangan Eselon memang tidak mudah dilakukan, pengurangan dilakukan bertahap tidak serta merta semua dihilangkan. Pengurangan pegawai itu dilihat dari hasil assessmentnya yang betul-betul tidak masuk kualifikasi, nanti ditawarkan pilihan-pilihan seperti *golden hand shake*.

Bapak Suhartono (Pokja Tata Laksana) menanyakan sebagai berikut :

Salah cara untuk mengkomunikasikan Reformasi Birokrasi adalah dengan menggunakan teknologi informasi. Bagaimana peranan teknologi informasi di Kementerian Keuangan dan KKP dalam pelaksanaan RB?

Jawaban dari :

Kementerian Kelautan dan Perikanan :

- Untuk teknologi informasi mempermudah, sehingga bekerja bisa dilakukan dimana saja.

### Paparan Pokja Reformasi Birokrasi

Paparan dari Bapak Herry A.A mewakili Pokja Manajemen Perubahan sebagai berikut :

- a. *Quick Wins* adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap satuan kerja. *Quick Wins* adalah repressetasi dari setiap pokja. *Diharapkan bulan Januari 2018* sudah dapat dilaksanakan. Batasan *Quick Wins* apakah bisa dirubah?

Tanggapan dari Ibu Cahaya C sebagai berikut :

- *Quick Wins* merupakan program kementerian yang mempunyai dampak yang besar, sebaiknya dari program prioritas yang digodok menjadi *Quick Wins*, yang

sebelumnya di 3 (tiga) Satker bisa beralih ke Kementerian Kominfo. Untuk kesehatan organisasi, tahun 2015 tentang entropi sudah ada, dan ini harus dievaluasi untuk meningkatkan nilai kesehatan. Hal ini punya pengaruh dalam kegiatan-kegiatan RB. Internalisasi jangan terpisah-pisah, proaktif ini sekarang tidak internalisasi lagi tapi diwujudkan dalam program. Apabila hanya sosialisasi hanya terjebak saja.

- b. Akan dilakukan pemilihan agen perubahan lain dengan memasukkan kriteria-kriteria yang mampu sebagai katalis, dan mampu memberikan perubahan. Diharapkan bulan Maret 2018 sudah mendapatkan agen-agen baru tersebut.

Tanggapan dari Ibu Cahaya C sebagai berikut :

- Agen Perubahan jika ditunjuk baru lagi akan bentrok-bentrok lagi, yang sudah ada diberdayakan saja.

Tanggapan dari Ibu Rita Amalidar sebagai berikut :

- Untuk Agen Perubahan periode kedua bagaimana? Mereka sudah terima SK tapi belum ada tindak lanjutnya. Penetapan Agen Perubahan selanjutnya bisa dilaksanakan, namun untuk Agen Perubahan yang ada saat ini bisa diberdayakan terlebih dahulu. Semakin banyak Agen Perubahan semakin bagus.

- c. Monev akan dilakukan pada bulan Mei 2018 dan November 2018, agar punya waktu untuk perbaikan-perbaikan.

Paparan dari Ibu Lesika S mewakili Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sebagai berikut :

- a. Sesuai Roadmap RB kominfo tahun 2018, akan melakukan implementasi dari NA dan Proses Bisnis. Telah mengusulkan penataan organisasi ke Kementerian PAN dan RB, perlu dilakukan penataan ulang tuisi dan Proses Bisnis. Untuk Permen Nomor 1 Tahun 2016 memang belum berdasarkan Proses Bisnis, tapi tahun 2018 akan berdasarkan Proses Bbisnis. Sampai akhir tahun 2017 kemungkinan belum dapat ditetapkan.

- b. Finalisasi reorganisasi dgn Kementerian PAN dan RB. Beberapa struktur organisasi sudah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB.
- c. Harmonisasi dan penetapan peraturan Menkominfo tentang OTK diagendakan paling lambat bulan April 2018 sudah menjadi Permen.
- d. Diharapkan ada internalisasi Permen Kominfo tentang OTK, dijadwalkan pada bulan Mei s.d September 2018.
- e. Implementasi permen OTK dari bulan Oktober s.d Desember 2018

Tanggapan dari Bapak Ivan Santoso sebagai berikut :

Bagaimana membedakan pekerjaan/Program Rowai dengan RB (Pokja Organisasi) ? Apakah sama atau memang berbeda?

Jawaban dari Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sebagai berikut :

- Rowai hanya fasilitasi dan koordinasi dan mendorong percepatan, diharapkan satker dapat menganggarkan. Yang dilakukan Rowai adalah bersifat fasilitasi dan dukungan administrasi ke Kementerian PAN dan RB dalam mengeksekusi usulan Kementerian PAN dan RB. Biasanya juga dianggarkan untuk kegiatan monitoring, penataan, dan evaluasi. Hasil usulan ini diusulkan ke Rowai. Perbedaannya terletak pada tugasnya masing-masing, misalkan dalam pembahasan penataan organisasi mengundang konsultan, untuk pokja lebih mendorong setiap satker dalam melakukan penataan organisasi.

Paparan dari Bapak Suhartono mewakili Pokja Penataan Tatalaksana sebagai berikut :

- a. Melakukan move Peta bisnis proses yang sudah dibuat, akan dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2018.
- b. Melakukan review SOP yang ada, saat ini yang belum UPT. Terkait dengan evaluasi SOP dan implemetasi e-Gov yang terintegrasi, pada kegiatan tahun 2018 ada 2 PK sekjen.
- c. PEGI ke depan akan berganti menjadi SPBE, pada 1 (satu) program di tahun 2018 terkait dengan rekomendasi bahwa Pokja Tatalaksana dengan satker terkait. Pada saat penyusunan Peta Bisnis Proses untuk memenuhi dokumen RB, apakah yang disusun itu dilihat dari implemetasi Proses Bisnisnya, rencannya sudah

berkoordinasi dengan Rowai untuk dilaksanakan pada bulan Maret - April 2018. Yang kedua, sebenarnya tahun 2017 sudah menyelesaikan SOP, yang belum selesai dari UPT, akan dilaksanakan pada bulan April 2018. Yang ketiga, penetapan Permen Kominfo tentang kearsipan, diantaranya tentang tata naskah dinas yang belum ditetapkan. Terkait dengan peningkatan teknologi informasinya akan mempergunakan digital signature (Januari s.d April 2018). Untuk klasifikasi arsip dan retensi akan dimulai juga, dan pedomannya pada bulan Maret s.d bulan Mei 2018.

- c. Pengelola barang jasa, bahwa sudah ada surat Sekjen bahwa pengadaan ULP dijadikan 1 pintu di biro umum. Bagaimana memastikan dalam pelaksanaan barjas dpt efektif efisien.
- d. Penguatan ZI, belum mendampingi dan mengevaluasi dari pelaksanaan ZI. Untuk pendampingan dimulai bulan Juni 2018.
- e. Impelemntasi e-Egov, sebenarnya sudah disusun dari tahun 2016, tapi sering tidak kuorum, namun tetap harus bisa diselesaikan.
- f. Keterbukaan informasi publik, permohonan dari masyarakat diajukan secara tertulis dengan dilengkapi syarat-syarat tertentu dan baru diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

Paparan dari Pokja Penataan Sumberdaya Manusia sebagai berikut :

- a. Ada 3 rekomendasi, tunjangan individu, pola karir dan talent pool. Tidak hanya dari rekomendasi namun juga ambil dari Roadmap RB.
- b. Yang pertama adalah peta jabatan yang formal, mencoba untuk menetapkan peta jabatan secara formal, lalu akan ditindaklanjuti dengan penataan pegawai. Untuk anggaran diambil dari kegiatan formasi pegawai.
- c. Melakukan penyempurnaan dan pengukuran monev.
- d. Penyusunan database kebutuhan diklat, perlu menetapkan standar kompetensi teknis di Kementerian Kominfo. Untuk ke depannya melihat dulu standar kompetensi teknis dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan database diklat.

- e. Untuk pola karir, karena secara menyeluruh masih meraba kondisinya, karena turunan peraturannya belum ada dari Kementerian PAN dan RB, maka masih *benchmarking*.
- f. Untuk talent pool, di tahun 2018 akan dilakukan talent pool untuk sisa di Eselon IV dan akan diikuti JFT dan JFU sebagian.

Tanggapan dari Ibu Cahaya C sebagai berikut :

Dapat diperjelas lagi untuk penataan ini sesuai dengan Permen Kominfo No.1 tahun 2016 atau dengan penataan organisasi selanjutnya?

Jawaban dari Pokja Penataan Sumberdaya Manusia sebagai berikut :

- Ini sesuai dgn Permen Kominfo No.1 tahun 2016. Makanya dapat diperjelas untuk penetapan jabatan sudah menyusun peta jabatan.

Paparan dari Bapak Hanifan mewakili Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Kominfo.
- b. Analisa dalam rangka deregulasi/simplifikasi Peraturan Menteri (PM), melalui penelaahan terkait simplifikasi regulasi bidang perizinan dan investasi serta penelaahan terkait deregulasi dengan menganalisa PM yang akan dicabut dan penyusunan Program Regulasi Kementerian Kominfo.
- c. Evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka simplifikasi, melalui evaluasi triwulan 2018 (B03,B06,B09,B012).
- d. Melakukan FGD dan konsultasi publik melalui website untuk melibatkan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pencetakan buku himpunan Peraturan Menteri Kominfo dilakukan dengan menginventarisasi himpunan Peraturan Menteri Kominfo dalam bentuk hardcopy dan softcopy Dilakukan secara reguler per tahun.

Paparan dari Ibu Huriana Munthe mewakili Pokja Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

- a. Rekomendasinya melakukan penyempurnaan cascading perjanjian kinerja sampai level terendah, penerapan cascading PK Eselon I hingga Eselon IV.
- b. Evaluasi Renstra Kementerian Kominfo.
- c. Penyusunan indikator kinerja Eselon III dan Eselon IV dan menuangkannya dalam SKP.
- d. Pembangunan aplikasi e-Kinerja yang berkerjasama dengan PDSI. Akan dilakukan review aplikasi yg ada di SDPPI, apakah bisa digunakan untuk kementean kominfo.
- e. Peningkatan kapasitas pengelolaan akuntabilitas kinerja di satuan kerja melalui pelatihan manajemen kinerja.
- f. PMO dan peningkatan sinergitas disatuan kerja dikeluarkan dr program pokja akuntabilitas.

Pertanyaan dari peserta kegiatan sebagai berikut : Apakah akuntabilitas kinerja sdh dipakai oleh pimpinan untuk menilai unit kerja.

Jawab dari Pokja Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut : Belum semua pimpinan terlibat. Di tahun 2018 keterlibatan pimpinan akan lebih ditingkatkan agar ada komitmen akan program yang telah ditetapkan.

Paparan dari Bapak Randy Arninto mewakili Pokja Penguatan Pengawasan sebagai berikut :

- a. Diklat TOT UPG
- b. Finalisasi pedoman pengendalian gratifikasi.
- c. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi.
- d. Mendorong Tingkat Kematangan SPIP Level 3.
- e. Monev MR, Pengendalian dan Mitigasi Risiko.
- f. Studi untuk kemungkinan integrasi dengan aplikasi LAPOR.
- g. Finalisasi Pedoman Pengaduan Masyarakat dan Sosialisasi Pedoman Pengaduan Masyarakat
- h. Anggaran Setiap Pokja disiapkan.
- i. Pembentukan Tim WBS Itjen

- j. Finalisasi Pedoman WBS dan Sosialisasi WBS kepada Stakeholders Internal & Eksternal.
- k. Finalisasi Benturan kepentingan serta Sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
- l. Monev atau revidi kebijakan benturan kepentingan
- m. Penilaian ulang untuk unit WBK, selanjutnya pengusulan unit WBK ke Kementerian PAN dan RB, dan penyiapan unit WBBM.
- n. Penyempurnaan Infrastruktur IACM Itjen dan Implementasinya, re-essessment IACM 2018, peningkatan kompetensi pegawai.
- o. Koordinasi percepatan penyelesaian TLHP APIP.

Paparan dari Ibu Lita Navilati mewakili Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai berikut :

- a. Draft Revisi KM No.555 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kominfo.
- b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018
- c. Pengelola pengaduan dengan kegiatan sebagai berikut : rapat koordinasi Persiapan Pengaduan Satu Pintu 159, Uji coba, implementasi, dan integrasi dengan LAPOR.
- d. Implementasi SE Sekjen terkait sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
- e. Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan di Kemkominfo. Pelaksanaan survey yang dilakukan ditingkat kementerian karena yang dilakukan saat ini masih tingkat unit kerja, mohon bantuan dari Badan Litbang SDM. Dan hasil survey dapat di upload ke website Kominfo, mohon bantuan PDSI. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut.
- f. Pelayanan Terintegrasi yaitu integrasi layanan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI serta Integrasi layanan Kementerian Kominfo dengan K/L lain (*Online Single Submission*) serta Integrasi dengan SIPPN (KemenpanRB).

- g. *Reward* dan *punishment* sudah ada draft. Sudah dilakukan finalisasi tentang surat edaran *reward* dan *punishment*. Selanjutnya membuat SOP, diharapkan tahun depan sudah berjalan, lalu ada monevnya juga.
- h. Sebenarnya ingin meminta masukan dari forum rapat bagaimana sebaiknya teknis pemberian *reward*, biasanya yang menerapkan di lingkungan BUMN.

### **3. HASIL YANG DICAPAI**

Hasil yang dicapai dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 adalah disusunnya rencana aksi pada 8 (delapan) Pokja RB berdasarkan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB pada *exit meeting* Evaluasi RB tanggal 27 November 2017.

### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pokja MP harus lebih memaksimalkan peran *agent of change* sebagai penggerak perubahan di lingkungannya dan lebih meningkatkan peran serta seluruh unit kerja terhadap pelaksanaan RB.
- b. Akan dilakukan pemilihan agen perubahan lain dengan memasukan kriteria-kriteria yang mampu sebagai katalis, dan mampu memberikan perubahan.
- c. Harmonisasi dan penetapan peraturan Menkominfo tentang OTK diagendakan paling lambat bulan April 2018 sudah menjadi Permen.
- d. Untuk talent pool, di tahun 2018 akan di lakukan talent pool untuk sisa di Eselon IV dan akan diikutkan JFT dan JFU.
- e. Analisa dalam rangka deregulasi/simplifikasi Peraturan Menteri (PM), melalui penelaahan terkait simplifikasi regulasi bidang perizinan dan investasi serta penelaahan terkait deregulasi dengan menganalisa PM yang akan dicabut dan penyusunan Program Regulasi Kementerian Kominfo.
- f. Penilaian ulang untuk unit WBK, selanjutnya pengusulan unit WBK ke Kementerian PAN dan RB, dan penyiapan unit WBBM.
- g. Dilakukan integrasi layanan Kementerian Kominfo dengan KL lain terkait *one single submission*.

Saran yang dapat disumbangkan terhadap hasil kegiatan ini adalah, ada unit khusus di bawah Sekjen untuk mengawal perubahan.

## **5. PENUTUP**

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dari Bapak. Terima kasih.

RITA AMALIDAR, SE., MM.